

## IMPLEMENTASI GAP ANALISIS DARI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE) PADA KABUPATEN BENER MERIAH

Ima Dwitawati

Information Technology Department, State of Islamic University Ar-Raniry, Banda Aceh, Indonesia  
E-mail : [ima@ar-raniry.ac.id](mailto:ima@ar-raniry.ac.id)

**Abstract:** This study presents a gap analysis of the implementation of Electronic-Based Government System (SPBE) in Bener Meriah Regency in 2021. The Gap Analysis was compiled based on the secondary data collection process in the form of the maturity level of the SPBE in Bener Meriah Regency which consists of the domains of policy, governance, management and SPBE services. The result of this research is a gap analysis which consists of a description of the area being analyzed, identification of the specific parts to be improved from the SPBE, the target achievement (desired state), the current state and an action plan based on the identification of the maturity level of SPBE process capabilities and technical functions.

**Keywords:** analysis gap, electronic-based government system

**Abstrak:** Penelitian ini menyajikan tentang analisis gap penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) kabupaten Bener Meriah tahun 2021. Analisis Gap disusun berdasarkan proses pengumpulan data sekunder berupa tingkat kematangan SPBE kabupaten Bener Meriah yang terdiri dari domain kebijakan, tata kelola, manajemen dan layanan SPBE. Hasil dari penelitian ini adalah analisis gap yang terdiri dari deskripsi area yang di analisis, identifikasi terhadap bagian spesifik yang akan diperbaiki dari SPBE, target capaian (*desired state*), kondisi saat ini (*current state*) dan rencana aksi (*action plan*) yang didasarkan pada identifikasi tingkat kematangan kapabilitas proses dan fungsi teknis SPBE.

**Keywords:** analisis gap, sistem pemerintahan berbasis elektronik, SPBE

### 1. Pendahuluan

Era Industri 4.0 ditandai dengan keberadaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang menjadi pemungkin (*enabler*) untuk seluruh aktivitas manusia, mulai dari lingkup personal, hingga profesional. Keberadaan teknologi informasi telah merubah (*shifting*) budaya manusia dari yang awalnya konvensional (*offline*) yang mengandalkan keberadaan fisik, ketersediaan ruang dan waktu kini semuanya berubah menjadi digital yang tidak lagi terbatas ruang dan waktu. Manusia sudah sangat dimudahkan dengan segala aktivitas yang bisa dilakukan dimana saja, kapan saja dan dalam waktu apa saja (*ubiquitous*).

Pandemi covid-19 memperkuat kebutuhan teknologi informasi ini dalam rangka manusia menjangkau dan menjalankan berbagai hal dalam kehidupannya, mulai dari aktivitas pendidikan, kesehatan, bisnis, kehidupan sehari-hari, hiburan, dan lain sebagainya. Kebutuhan ini tentu harus juga mampu di terjemahkan dengan baik oleh pengampu kebijakan publik dari tingkat pusat, provinsi hingga kabupaten

---

kota. Salah satu terjemahan untuk menyediakan kemudahan akses kepada masyarakat dalam hal pelayanan publik adalah melalui penerapan Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik (SPBE).

Pemerintah Daerah Kabupaten Bener Meriah sangat menyadari akan pentingnya peranan SPBE untuk mendukung pembangunan di segala sektor di wilayah ini. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Bener Meriah berupaya dalam mendorong semua organisasi perangkat daerah yang disebut dengan Satuan Kerja Pemerintah Kabupaten (SKPK) untuk menerapkan SPBE secara bertahap dan berkesinambungan sesuai dengan kemampuan dan kapasitas masing-masing.

Dalam membangun kesamaan penerapan SPBE yang berkekuatan hukum di antara SKPK Kabupaten Bener Meriah, maka diperlukan adanya penyusunan Rencana Induk atau Master Plan SPBE Pemerintahan Daerah yang digunakan sebagai pedoman bagi seluruh SKPK. Penyusunan ini harus dimulai dengan melihat kondisi aktual (*current state*) yang berlangsung di kabupaten Bener Meriah, kondisi aktual ini kemudian akan dijadikan acuan untuk merencanakan aksi yang akan dilakukan (*action plan*) dan target capaian (*Future State*) dalam rangka suksesnya penyelenggaraan SPBE. Narasi yang mendeskripsikan kondisi aktual, rencana aksi, dan target capaian disebut dengan Analisis Gap (*Gap Analysis*).

Diharapkan Analisis Gap SPBE Kabupaten Bener Meriah ini akan menggambarkan secara rinci tentang kondisi yang sudah berlangsung dan diterapkan oleh berbagai elemen pemangku kebijakan publik di kabupaten Bener Meriah, dengan demikian akan diperoleh hasil Gap Analisis yang bisa dijadikan acuan dalam rangka penyusunan rencana induk SPBE kabupaten Bener Meriah.

## **2. Kajian Kepustakaan**

### **2.1 Analisis Gap (*Gap Analysis*)**

Analisis Gap merupakan suatu metode untuk memperkirakan apakah kinerja dari suatu kegiatan maupun layanan pada satu organisasi telah memenuhi syarat dan tujuan yang telah ditetapkan, jika sudah terpenuhi maka selanjutnya apa apa yang harus dilakukan, dan jika belum maka apa strategi yang harus ditempuh sehingga syarat dan tujuan dari kinerja dari kegiatan ataupun layanan tersebut dapat terpenuhi (Hanna, K.T., 2021).

Ikhtisar *Gap Analysis* disajikan untuk memberi gambaran secara rinci tentang kondisi Sistem Pelayanan Berbasis Elektronik (SPBE) kabupaten Bener Meriah pada saat sekarang ini (*Current State*), dilanjutkan dengan penetapan tahapan inti dalam rangka menjembatani kesenjangan yang ada (*bridging step/ Action Plan*), hingga kemudian akan tercapai tujuan penyelenggaraan SPBE sesuai dengan target yang sudah ditentukan dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2026 (*Desired State*). *Gap Analysis* merepresentasikan tentang tingkat kematangan kapabilitas proses dan fungsi teknis SPBE kabupaten Bener Meriah pada kondisi aktual melalui 5 tahapan berikut:

1. Deskripsi area yang di analisis
2. Identifikasi terhadap bagian spesifik yang ingin diperbaiki
3. Target capaian (*Desired State*)

4. Kondisi saat ini (*Current State*)
5. Rencana Aksi (*Action Plan*)

Kondisi aktual, hasil pengukuran tingkat kematangan kapabilitas proses dan tingkat kematangan fungsi teknis, pada tahun 2021 terhadap 4 (empat) domain SPBE yaitu: 1) Kebijakan, 2) Tata Kelola, 3) Manajemen, dan 4) Layanan. Untuk memenuhi target capaian SPBE (*Desired State*) sesuai dengan ketentuan *Road Map* SPBE Nasional, maka kemudian peta rencana strategis SPBE kabupaten Bener Meriah di tuangkan ke dalam bentuk program yang dilaksanakan secara bertahap dari tahun 2022 sampai dengan 2026.

## 2.2 Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau *e-Government* adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada masyarakat. Tujuan dari adanya SPBE sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Bener Meriah Nomor 11 tahun 2020.

Percepatan pembangunan Aparatur Sipil Negara (ASN) dapat dilakukan melalui reformasi birokrasi sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025. Terdapat delapan area perubahan yang diinginkan meliputi, penataan dan pengelolaan pengawasan, akuntabilitas kelembagaan, tata laksana, SDM aparatur, peraturan perundang-undangan, pelayanan publik, dan pola pikir dan budaya kerja. SPBE sendiri adalah bagian dari perubahan tata laksana dengan menerapkan sistem, proses, prosedur kerja yang transparan, efektif, efisien dan terukur. Selain itu, SPBE juga mendukung ke-delapan ranah perubahan sebagai fondasi utama dalam mewujudkan ASN yang profesional dan tata kelola pemerintah yang dengan memanfaatkan Teknologi Informasi Komunikasi (TIK).

Pemerintah Daerah Kabupaten Bener Meriah sangat menyadari akan pentingnya peranan SPBE untuk mendukung pembangunan di segala sektor di wilayahnya. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Bener Meriah akan selalu berupaya dalam mendorong semua organisasi perangkat daerah yang disebut dengan Satuan Kerja Pemerintah Kabupaten (SKPK) untuk menerapkan SPBE secara bertahap dan berkesinambungan sesuai dengan kemampuan dan kapasitas masing-masing. Dalam membangun kesamaan penerapan SPBE yang berkekuatan hukum di antara SKPK Kabupaten Bener Meriah, maka diperlukan adanya penyusunan Rencana Induk atau Master Plan SPBE Pemerintahan Daerah yang digunakan sebagai pedoman bagi seluruh SKPK. Rencana Induk SPBE Pemerintahan Daerah tersebut disusun dengan memperhatikan arah kebijakan, strategi, dan inisiatif pada bidang tata kelola SPBE, layanan SPBE, TIK, serta SDM untuk mencapai tujuan strategis SPBE Kabupaten Bener Meriah tahun 2020-2025 dan tujuan pembangunan aparatur sipil negara sebagaimana ditetapkan dalam RPJP Nasional 2005-2025 dan *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025.

Penyusunan rencana induk tersebut perlu dilakukan secara terencana dan terstruktur dengan melibatkan seluruh jajaran Pemerintahan Kabupaten Bener Meriah dalam menentukan arah pengembangan dan proses evaluasinya. Diharapkan Rencana Induk SPBE ini dapat dijadikan acuan seluruh SKPK Kabupaten Bener Meriah dalam mengimplementasikan SPBE di wilayah kerjanya

masing-masing. Dalam mengantisipasi perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang sangat cepat serta adaptasi terhadap perubahan-perubahan pada sistem pemerintahan ke depan, maka dokumen rencana induk SPBE ini harus bersifat dinamis, dimana diperlukan upaya peninjauan ulang secara terus menerus untuk menjaga aktualitas dari dokumen ini.

### 2.3 Kabupaten Bener Meriah

Kabupaten Bener Meriah merupakan kabupaten muda di Provinsi Aceh. Berdiri sejak tahun 2003. Kabupaten Bener Meriah merupakan pemekaran dari Kabupaten Aceh Tengah. Pembentukan Kabupaten Bener Meriah berdasarkan UU No. 41 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Aceh. Diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri tanggal 7 Januari 2004.

Nama “Bener Meriah” diambil dari nama salah seorang putra keturunan Raja Linge XIII di Gayo, yaitu *Beuner Meuria*. “Bener Meriah” juga merupakan gabungan dari dua kata *bener* (Bahasa Gayo), dan meriah (Bahasa Indonesia). *Bener* berarti bagus, senang, indah; dan meriah berarti ramai, kebesaran, kemuliaan. “Bener Meriah” kemudian menjadi ungkapan yang berarti dataran luas yang indah, ramai, dan sejahtera.

Kabupaten Bener Meriah memiliki posisi strategis berada di tengah-tengah Provinsi Aceh dengan Kota Simpang Tiga Redelong dipilih sebagai ibukotanya. Posisi geografis terletak pada 4°33’50”- 4°54’50” Lintang Utara dan 96°40’75” - 97°17’53” Bujur Timur, dengan ketinggian rata-rata 100 – 2500 mdpl. Kabupaten Bener Meriah memiliki luas wilayah darat 197.271,31 Ha yang terdiri dari 10 Kecamatan. Kabupaten ini berbatasan langsung dengan Kabupaten Aceh Timur dan Kabupaten Aceh Utara Sebelah Timur, Kabupaten Bireuen, Kabupaten Aceh Utara dan Kabupaten Aceh Timur Sebelah Utara, Kabupaten Aceh Tengah dan Kabupaten Aceh Timur di sebelah Selatan, dan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Aceh Tengah di sebelah Barat. Sebagian besar wilayahnya merupakan pegunungan yang berhawa sejuk, sehingga dikenal sebagai salah satu kabupaten tujuan wisata di Provinsi Aceh.

Sebagai Kabupaten muda, Masyarakat dan Pemerintah Daerah Kabupaten Bener Meriah dari waktu ke waktu terus berbenah diri dan bertekad untuk dapat menyejajarkan diri dengan wilayah lain di Aceh maupun di Indonesia. Berbagai upaya dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bener Meriah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, serta meningkatkan partisipasi publik dalam penyelenggaraan pembangunan di daerah ini. Terkait hal tersebut kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM) khususnya dalam lingkungan pemerintah Kabupaten Bener Meriah sangat diperlukan untuk mengantisipasi arus globalisasi dan demokratisasi agar mampu melakukan perubahan mendasar pada sistem dan mekanisme pemerintahan. Demikian juga dilakukan sinergi kebijakan dan program pembangunan yang mengikutsertakan seluruh elemen masyarakat. Sehingga akan tercipta sistem pemerintahan dan pelayanan publik yang memiliki aspek transparansi, akuntabilitas, dan kinerja tinggi.

### 3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif *Research and Development (R&D)*. *Research and Development* dalam penelitian ini bertujuan untuk

mengimplementasikan analisis gap dari tingkat kematangan penyelenggaraan layanan SPBE di kabupaten Bener Meriah pada tahun 2021 untuk kemudian bisa dijadikan sebagai rujukan dalam rangka penyusunan Rencana Induk SPBE yang bisa diterapkan pada tahun 2022 sampai dengan tahun 2026.

Teknik perolehan data dalam penelitian ini adalah merupakan data sekunder. Data sekunder yang diperoleh adalah berupa hasil penilaian tingkat kematangan sistem penyelenggaraan berbasis elektronik kabupaten Bener Meriah menggunakan *e-Government Maturity Model (eMM)* yang mengacu pada 4 domain, 9 aspek dan 47 indikator SPBE. Tingkat kematangan SPBE menunjukkan bahwa: a) Tingkat kematangan kebijakan SPBE kabupaten Bener Meriah memiliki bobot nilai 1,7 (satu koma tujuh), b) Tingkat kematangan Tata Kelola SPBE kabupaten Bener Meriah memiliki bobot nilai 1,7 (satu koma tujuh), c) Tingkat kematangan Manajemen SPBE kabupaten Bener Meriah memiliki bobot nilai 1,18 (satu koma delapan belas), dan d) Tingkat kematangan Layanan SPBE kabupaten Bener Meriah memiliki bobot nilai 2,95 (dua koma Sembilan puluh lima).

#### 4. Hasil dan Pembahasan

##### 4.1 Hasil

Hasil dari penelitian ini adalah berupa analisis gap dari penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) kabupaten Bener Meriah pada tahun 2021, yang terdiri dari domain kebijakan, tata kelola, manajemen, dan layanan.

Analisis Gap berdasarkan hasil identifikasi yang dilakukan terhadap tingkat kematangan kapabilitas proses dan fungsi teknis dari domain kebijakan SPBE kabupaten Bener Meriah adalah seperti yang ditunjukkan pada Tabel 1.

**Tabel 1.** *Gap Analysis* Kebijakan SPBE Kabupaten Bener Meriah

Area yang di analisis : <b>Kebijakan SPBE</b>	Dilakukan identifikasi terhadap tingkat <b>kematangan kapabilitas proses</b> dan <b>fungsi teknis</b> domain Kebijakan SPBE kabupaten Bener Meriah. Identifikasi ini tidak mempertimbangkan tingkat kematangan yang dipengaruhi oleh hal lainnya.	
<b>Target Capaian (Desire State)</b>	<b>Kondisi saat ini (Current state)</b>	<b>Rencana Aksi (Action plan)</b>
1. Capaian <b>Optimum</b> pada tingkat kematangan kebijakan <b>kapabilitas proses SPBE</b> kabupaten Bener Meriah  2. Capaian <b>Optimalisasi</b> pada tingkat kematangan kebijakan <b>fungsi teknis SPBE</b> kabupaten Bener Meriah	1. Tingkat kematangan kebijakan <b>kapabilitas proses SPBE</b> = 1,7 ( <b>rintisan</b> )  2. tingkat kematangan kebijakan <b>fungsi teknis SPBE</b> = 1,7 ( <b>Informasi</b> )	1.1 Patokan yang digunakan untuk mengukur tingkat kematangan kebijakan <b>kapabilitas proses SPBE</b> : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan berorientasi pada kualitas secara berkesinambungan.</li> <li>• Kebijakan internal telah mengatur mekanisme evaluasi berkelanjutan dan manajemen perubahan</li> </ul> 1.2 Review hasil tingkat kematangan

		<p>2.1 Patokan yang digunakan untuk mengukur tingkat kematangan kebijakan <b>fungsi teknis</b> SPBE</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kebijakan SPBE dapat beradaptasi terhadap perubahan kebutuhan di lingkungan internal dan eksternal</li> </ul> <p>2.2 Review hasil tingkat kematangan</p>
--	--	---

Sumber: Data diolah

Analisis Gap berdasarkan hasil identifikasi yang dilakukan terhadap tingkat kematangan kapabilitas proses dan fungsi teknis dari domain tata kelola SPBE kabupaten Bener Meriah adalah seperti yang ditunjukkan pada Tabel 2.

**Tabel 2.** Gap Analysis Tata Kelola SPBE Kabupaten Bener Meriah

Area yang di analisis: <b>Tata Kelola SPBE</b>	Dilakukan identifikasi terhadap tingkat <b>kematangan kapabilitas proses</b> dan <b>fungsi teknis</b> domain <b>Tata Kelola SPBE</b> kabupaten Bener Meriah. Identifikasi ini tidak mempertimbangkan tingkat kematangan yang dipengaruhi oleh hal lainnya.	
<b>Target Capaian (Desire State)</b>	<b>Kondisi saat ini (Current state)</b>	<b>Rencana Aksi (Action plan)</b>
<p>1. Capaian <b>Optimum</b> pada tingkat kematangan Tata Kelola <b>kapabilitas proses SPBE</b> kabupaten Bener Meriah</p> <p>2. Capaian <b>Optimalisasi</b> pada tingkat kematangan Tata Kelola <b>fungsi teknis</b> SPBE kabupaten Bener Meriah</p>	<p>1. Tingkat kematangan tata kelola pada <b>kapabilitas proses SPBE</b> = 1,7 (<b>rintisan</b>)</p> <p>2. Tingkat kematangan tata kelola pada <b>fungsi teknis</b> SPBE = 1,7 (<b>Informasi</b>)</p>	<p>1.1 Patokan yang digunakan untuk mengukur tingkat kematangan tata kelola <b>kapabilitas proses SPBE</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Proses tata kelola SPBE berorientasi pada kualitas secara berkelanjutan.</li> <li>• Tata Kelola internal telah mengatur mekanisme evaluasi berkelanjutan dan manajemen perubahan</li> </ul> <p>1.2 <b>Review</b> hasil tingkat kematangan</p> <p>2.1 Patokan yang digunakan untuk mengukur tingkat kematangan tata kelola untuk <b>fungsi teknis</b> SPBE</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tata Kelola SPBE dapat beradaptasi terhadap perubahan kebutuhan di lingkungan internal dan eksternal</li> </ul> <p>2.2 <b>Review</b> hasil tingkat kematangan</p>

Sumber: Data diolah

Analisis Gap berdasarkan hasil identifikasi yang dilakukan terhadap tingkat kematangan kapabilitas proses dan fungsi teknis dari domain manajemen SPBE kabupaten Bener Meriah adalah seperti yang ditunjukkan pada Tabel 3.

**Tabel 3.** *Gap Analysis* Manajemen SPBE Kabupaten Bener Meriah

Area yang di analisis: <b>Manajemen SPBE</b>	Dilakukan identifikasi terhadap tingkat <b>kematangan kapabilitas proses</b> dan <b>fungsi teknis</b> domain <b>Manajemen SPBE</b> kabupaten Bener Meriah. Identifikasi ini tidak mempertimbangkan tingkat kematangan yang dipengaruhi oleh hal lainnya.	
<b>Target Capaian (Desire State)</b>	<b>Kondisi saat ini (Current state)</b>	<b>Rencana Aksi (Action plan)</b>
1. Capaian <b>Optimum</b> pada tingkat kematangan Manajemen <b>kapabilitas proses SPBE</b> kabupaten Bener Meriah  2. Capaian <b>Optimalisasi</b> pada tingkat kematangan Manajemen <b>fungsi teknis SPBE</b> kabupaten Bener Meriahn	1. Tingkat kematangan manajemen pada <b>kapabilitas proses SPBE = 1,18 (rintisan)</b>  2. Tingkat kematangan tata kelola pada <b>fungsi teknis SPBE = 1,18 (Informasi)</b>	1.1 Patokan yang digunakan untuk mengukur tingkat kematangan manajemen <b>kapabilitas proses SPBE</b> : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Proses manajemen SPBE berorientasi pada kualitas secara berkelanjutan.</li> <li>• Manajemen internal telah mengatur mekanisme evaluasi berkelanjutan dan manajemen perubahan</li> </ul> 1.2 <b>Review</b> hasil tingkat kematangan  2.2 Patokan yang digunakan untuk mengukur tingkat kematangan manajemen untuk <b>fungsi teknis SPBE</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Manajemen SPBE dapat beradaptasi terhadap perubahan kebutuhan di lingkungan internal dan eksternal</li> </ul> 2.2 <b>Review</b> hasil tingkat kematangan

Sumber: Data diolah

Analisis Gap berdasarkan hasil identifikasi yang dilakukan terhadap tingkat kematangan kapabilitas proses dan fungsi teknis dari domain layanan SPBE kabupaten Bener Meriah adalah seperti yang ditunjukkan pada Tabel 4.

**Tabel 4.** *Gap Analysis* Layanan SPBE Kabupaten Bener Meriah

Area yang di analisis: <b>Layanan SPBE</b>	Dilakukan identifikasi terhadap tingkat <b>kematangan kapabilitas proses</b> dan <b>fungsi teknis</b> domain <b>Layanan SPBE</b> kabupaten Bener Meriah. Identifikasi ini tidak mempertimbangkan tingkat kematangan yang dipengaruhi oleh hal lainnya.	
---	--	--

Target Capaian ( <i>Desire State</i> )	Kondisi saat ini ( <i>Current state</i> )	Rencana Aksi ( <i>Action plan</i> )
<p>1. Capaian <b>Optimum</b> pada tingkat kematangan layanan <b>kapabilitas proses SPBE</b> kabupaten Bener Meriah</p> <p>2. Capaian <b>Optimalisasi</b> pada tingkat kematangan layanan <b>fungsi teknis SPBE</b> kabupaten Bener Meriah</p>	<p>1. Tingkat kematangan layanan pada <b>kapabilitas proses SPBE = 2.95 (Terstandar)</b></p> <p>2. Tingkat kematangan tata kelola pada <b>fungsi teknis SPBE = 2.95 (Transaksi)</b></p>	<p>1.1 Patokan yang digunakan untuk mengukur tingkat kematangan layanan <b>kapabilitas proses SPBE</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Proses layanan SPBE berorientasi pada kualitas secara berkelanjutan.</li> <li>• Layanan internal telah mengatur mekanisme evaluasi berkelanjutan dan manajemen perubahan</li> </ul> <p>1.2 <b>Review</b> hasil tingkat kematangan</p> <p>2.1 Patokan yang digunakan untuk mengukur tingkat kematangan layanan untuk <b>fungsi teknis SPBE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• layanan SPBE dapat beradaptasi terhadap perubahan kebutuhan di lingkungan internal dan eksternal</li> </ul> <p>2.2 <b>Review</b> hasil tingkat kematangan</p>

Sumber: Data diolah

## 4.2 Pembahasan

Berdasarkan hasil gap analisis yang sudah diperoleh, terlihat bahwa tingkat kematangan penyelenggaraan SPBE di kabupaten Bener Meriah masih relatif rendah baik dari kapabilitas prosesnya maupun fungsi teknis yang sudah berjalan. Analisis gap yang sudah diimplementasikan dapat dijadikan acuan dalam Menyusun strategi dan rencana aksi dalam rangka meningkatkan tingkat kematangan SPBE kabupaten Bener Meriah tahun berikutnya, yakni 2022 sampai dengan 2026.

## 5. Kesimpulan dan Saran

### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian pada bagian sebelumnya disimpulkan bahwa implementasi analisis gap penyelenggaraan SPBE kabupaten Bener Meriah tahun 2021 diperoleh berdasarkan analisa terhadap tingkat kematangan SPBE kabupaten Bener Meriah yang terdiri dari 4 (empat) domain, yaitu: kebijakan, tata kelola, manajemen, dan layanan. Analisis gap yang dihasilkan didasarkan pada indentifikasi kematangan kapabilitas proses dan fungsi teknis SPBE dengan tidak mempertimbangkan tingkat kematangan yang disebabkan oleh hal lainnya.



## 5.2 Saran

Analisis gap SPBE kabupaten Bener Meriah tahun 2021 ini diharapkan dapat dijadikan acuan sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Induk SPBE kabupaten Bener Meriah tahun 2022 sampai dengan tahun 2026. Analisis gap ini dihasilkan berdasarkan data sekunder hasil pengukuran tingkat kematangan SPBE menggunakan *e-Government Maturity Model (e-MM)*. Untuk lebih memastikan analisis gap yang benar-benar sesuai dengan kondisi yang ada pada kabupaten Bener Meriah berkaitan dengan penyelenggaraan SPBE, ke depan bisa juga dilakukan implementasi analisis gap melalui perolehan data primer.

## Daftar Pustaka

- Afrianda C., Kelly R.S. Riyanarto S., (2020). Gap Analysis Business Process Model Using Structural Similarity. *Indonesian Journal of Electrical Engineering and Computer Science* 18(1), 124-134.
- Bappeda Kabupaten Bener Meriah. (2019). Profil Kabupaten Bener Meriah. <https://ppid.benermeriahkab.go.id/inpub/download/EUIDNbeB>
- Femi D. A. & Basuki H.W., (2021). Implementasi Gap Analysis untuk Evaluasi Kinerja Dosen Berdasarkan Sasaran Mutu. *Jurnal Format*. 10(1), 101-109.
- Hanna, K.T., “*Gap Analysis*”, TechTarget, 2021., [Online]. Available: <https://www.techtarget.com/searchcio/definition/gap-analysis>. [accessed: 12-Des-2021].
- Jdih., “Peraturan Presiden No.95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik”, 2021., [Online]. Available: <https://jdih.bssn.go.id/arsip-hukum/peraturan-presiden-republik-indonesia-nomor-95-tahun-2018-tentang-sistem-pemerintahan-berbasis-elektronik>. [accessed 12-Des-2021].
- Rita C.R., & James D.K., 2014., *Design and Development Research.*, Lawrence Erlbaum Associates, Inc. ISBN: 9781136791284, 1136791280.